

# PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN KOWIOHA

Cici Maimunai<sup>1</sup>; Sasmita Nabilah Syahrir<sup>2</sup>; Sri Ayu Pracita<sup>3</sup>

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Jln. Pemuda No. 339, Tahoa, Kec. Kolaka, kabupaten Kolaka Tlp:092260526057  
E-mail : [cicimaimuna20@gmail.com](mailto:cicimaimuna20@gmail.com) (Korespondensi)

**Abstract:** This study examines the influence of accountability and transparency on the management of Family Hope Program (PKH) funds in Kowioha Village, Wundulako District, Kolaka Regency. Using a quantitative associative approach, the study involved all 44 PKH beneficiaries through a saturated sampling technique. Data were collected using structured questionnaires and analyzed with multiple linear regression in SPSS 27. The findings indicate that accountability, transparency, and PKH fund management are generally rated as good. The t-test results reveal that accountability has a positive and significant effect on PKH fund management, demonstrating that effective reporting, supervision, and responsibility enhance program implementation. Transparency also shows a positive and significant influence, highlighting the importance of accessible information in strengthening public trust and program effectiveness. The F-test confirms that accountability and transparency jointly affect PKH fund management, while the coefficient of determination ( $R^2$ ) indicates that both variables explain most of the variation in fund management. Strengthening accountability and transparency is therefore essential to improve the effectiveness, reliability, and public trust in PKH fund management.

**Keywords:** *Accountability; Family Hope Program (PKH); Fund Management; Social Assistance; Transparency*

Pengelolaan dana publik dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan pemerintah dapat dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Secara teoritis, hubungan antara pemerintah dan pengelola program dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (Jensen dan Meckling, 1976), di mana pemerintah sebagai *principal* memberikan mandat kepada pengelola sebagai *agent*. Dalam hubungan ini berpotensi terjadi asimetri informasi yang dapat memicu penyimpangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang baik. Oleh karena itu, akuntabilitas berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola, sedangkan transparansi menjadi

sarana keterbukaan informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut.

Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pengelola dalam menyampaikan laporan, mematuhi prosedur, serta memastikan penggunaan dana sesuai tujuan program. Penelitian Nugroho et al. (2020) dan Deshans dan Subardjo (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana publik. Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti informasi penerima bantuan dan mekanisme penyaluran dana. Penelitian Daud et al. (2022) serta Majid dan Zaerudin (2023) menegaskan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah penyimpangan.

Secara konseptual, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola yang baik. Akuntabilitas tanpa transparansi berpotensi menimbulkan

keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, sehingga pengawasan publik menjadi lemah. Sebaliknya, transparansi tanpa akuntabilitas hanya menghasilkan keterbukaan informasi tanpa adanya jaminan pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, kedua variabel ini harus diterapkan secara bersamaan agar pengelolaan dana publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini didukung oleh penelitian Ayu et al. (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana publik, serta Rahayu dan Suryanto (2023) yang menegaskan bahwa penerapan kedua prinsip tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Dalam konteks pengelolaan dana PKH di tingkat kelurahan, penerapan akuntabilitas dan transparansi menjadi semakin penting karena program ini berhubungan langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Tingkat kedekatan antara pengelola program dan masyarakat memungkinkan terjadinya interaksi yang intens, sehingga keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi bentuk kontrol sosial yang dapat memperkuat implementasi prinsip *good governance*.

Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor fundamental dalam pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas program, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima.

Tahun	Jumlah KPM
2021	38
2022	38
2023	38
2024	44

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penerima PKH relatif stabil pada tahun 2021 hingga 2023, namun mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 44 KPM. Selain itu, terdapat sekitar 15% penerima yang tidak lagi memperoleh bantuan karena kondisi ekonomi yang membaik atau perubahan komponen bantuan. Hal ini menunjukkan adanya proses evaluasi dalam program, namun di sisi lain juga menuntut adanya sistem pengelolaan dana yang lebih baik agar tetap tepat sasaran dan efektif.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana PKH, seperti kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penetapan penerima bantuan, besaran dana yang diterima, serta mekanisme penyaluran. Selain itu, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif mikro dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada tingkat individu penerima manfaat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada unit mikro, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga mampu menggambarkan kondisi empiris secara spesifik di tingkat kelurahan.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dengan populasi sebanyak 44 KPM. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel.

Variabel penelitian terdiri dari akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ )

sebagai variabel independen, serta pengelolaan dana PKH (Y) sebagai variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1–5. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas (Pearson Product Moment) dan reliabilitas (Cronbach's Alpha > 0,60). Analisis data meliputi statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), serta didahului dengan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

## HASIL

Berdasarkan tabel ringkasan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara deskriptif seluruh variabel berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan dana PKH telah berjalan dengan cukup efektif di Kelurahan Kowioha. Dari sisi kualitas instrumen, seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (0,297). Selain itu, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,765 menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik, sehingga dapat digunakan secara konsisten dalam pengukuran.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh persyaratan, yaitu data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana PKH. Transparansi memiliki koefisien yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa variabel ini lebih dominan dalam mempengaruhi pengelolaan dana PKH.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi masing-

masing berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana PKH. Selain itu, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,903 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi pengelolaan dana PKH, yaitu sebesar 90,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap pengelola program wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, keputusan, dan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks PKH, hal ini tercermin dari penyusunan laporan, pelaksanaan prosedur penyaluran bantuan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana PKH. Artinya, semakin baik tingkat akuntabilitas, maka semakin baik pula pengelolaan dana yang dilakukan. Sistem pertanggungjawaban yang jelas mampu mendorong proses penyaluran bantuan berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai ketentuan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putra (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial, serta Sari dan Rahman (2022) yang menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan dana yang transparan dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam perspektif Teori Agensi, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian antara pemerintah sebagai *principal* dan pengelola PKH sebagai *agent*. Temuan ini

juga didukung oleh Afrianti et al. (2024) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berperan penting meskipun masih terdapat kendala dalam praktiknya.

Dengan demikian, penerapan akuntabilitas yang baik melalui pelaporan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan keterlibatan masyarakat dapat meminimalkan asimetri informasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana PKH, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan program pemerintah. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), transparansi terlihat dari keterbukaan informasi terkait penentuan penerima manfaat, besaran bantuan, serta proses penyaluran dana.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana PKH. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka informasi yang diberikan, maka pengelolaan dana akan semakin baik. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengelolaan dana sekaligus berperan dalam pengawasan program.

Temuan ini didukung oleh Rahayu (2023) yang menyatakan bahwa transparansi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial melalui partisipasi masyarakat. Nugroho (2024) juga menegaskan bahwa transparansi dapat meminimalkan penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Selain itu, indikator transparansi menurut UNDP (2018) meliputi aksesibilitas informasi, keterbukaan proses, dan kejelasan pelaporan.

Dengan demikian, transparansi yang baik mampu mengurangi kesalahpahaman masyarakat, meningkatkan pengawasan

publik, serta mendukung pengelolaan dana PKH yang lebih efektif dan dapat dipercaya.

### **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam mewujudkan *good governance*. Dalam pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH), kedua prinsip ini berperan penting untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran dan sesuai tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana PKH. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana akan semakin baik jika kedua prinsip diterapkan secara bersama. Akuntabilitas berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sedangkan transparansi memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan Pratama dan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama meningkatkan efektivitas pengelolaan dana publik. Hidayat (2022) juga menegaskan bahwa kedua faktor tersebut penting dalam meningkatkan kinerja program bantuan sosial.

Dalam perspektif Teori Agensi, akuntabilitas dan transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik antara *principal* dan *agent*, sehingga pengelolaan dana menjadi lebih efektif dan dapat dipercaya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Secara parsial, akuntabilitas berpengaruh positif, yang menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban, pelaporan, dan kepatuhan terhadap prosedur, maka pengelolaan dana PKH akan semakin tertib

dan efektif. Transparansi juga berpengaruh positif, di mana keterbukaan informasi terkait pelaksanaan program dan penyaluran bantuan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pengelolaan dana.

Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana PKH. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kedua prinsip secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana sehingga program berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan dana PKH yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan, pengawasan, dan keterbukaan informasi agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afrianti, D., Hasanah, N., & Putri, R. (2024). Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik pada sektor pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(1), 45–56.
- Ayu, N. P., Sari, D. M., & Wijaya, R. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 10(2), 112–123.
- Daud, M., Rahman, A., & Yusuf, H. (2022). Transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 67–78.
- Deshans, R., & Subardjo, A. (2025). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 25–38.
- Hidayat, T. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja program bantuan sosial. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 89–101.
- Majid, A., & Zaerudin, M. (2023). Analisis transparansi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Kebijakan Sosial*, 11(1), 55–66.
- Nugroho, A., Prasetyo, B., & Lestari, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 134–145.
- Nugroho, A. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah. *Jurnal Manajemen Publik*, 13(1), 22–34.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(2), 98–110.
- Rahayu, S., & Suryanto, T. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Negara*, 14(1), 40–52.
- Sari, M., & Rahman, F. (2022). Peran akuntabilitas dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 77–88.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Governance principles: Transparency and accountability*. New York: UNDP.